

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Teori Desentralisasi Fiskal (*Fiscal Decentralization Theory*)

Teori *Fiscal Federalism* pertama kali diperkenalkan oleh Hayek (1945), kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Musgrave (1959) dan Oates (1972) sebagaimana dikutip dalam Tsalits (2017). Teori ini menyoroti pentingnya desentralisasi fiskal, yaitu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam perkembangannya, teori ini dibagi menjadi dua sudut pandang utama. Perspektif pertama, yaitu *traditional theories* atau *first generation theory* yang dipelopori oleh Hayek (1945), lebih menekankan pada efisiensi alokasi sumber daya melalui desentralisasi. Sementara itu, perspektif kedua, yakni *new perspective theories* atau *second generation theory* yang dikembangkan oleh Musgrave (1959) dan Oates (1972), berfokus pada bagaimana desentralisasi memengaruhi perilaku pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan.

Menurut Saragih & Ardinawati, (2026), pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam suatu negara dapat tercapai secara optimal apabila didukung oleh peran pemerintah dan kebijakan ekonomi yang tepat. Peran tersebut tercermin dalam tiga fungsi utama pemerintahan, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi berkaitan dengan penyediaan barang publik serta pengelolaan sumber daya agar dapat dimanfaatkan baik sebagai barang privat maupun barang publik, termasuk dalam menentukan komposisi penyediaannya. Fungsi distribusi berhubungan dengan pembagian pendapatan dan kekayaan secara proporsional agar tercipta pemerataan dan

keadilan sosial. Sementara itu, fungsi stabilisasi mengacu pada penggunaan kebijakan anggaran sebagai instrumen untuk menjaga kestabilan ekonomi, khususnya dalam meningkatkan kesempatan kerja.

2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Growth Theory*)

Teori pertumbuhan ekonomi baru (*New Growth Theory*) diperkenalkan oleh Paul M. Romer pada tahun 1986 dan Robert Lucas pada tahun 1988 sebagai bentuk kritik terhadap teori pertumbuhan neoklasik Solow. Teori ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi bersifat endogen, artinya berasal dari dalam sistem ekonomi itu sendiri dan sangat dipengaruhi oleh mekanisme produksi, bukan oleh faktor eksternal Sholikhah et al., (2024) . Selain itu, teori ini juga menegaskan pentingnya peran modal manusia sebagai faktor utama dalam meningkatkan produktivitas ekonomi. Sementara itu, konsep *growth without development* menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi yang hanya diukur melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) tidak selalu mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Suatu negara dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun tanpa diiringi dengan pembangunan manusia seperti peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, serta pemerataan distribusi pendapatan kemiskinan dan ketimpangan tetap dapat terjadi. Konsep ini mengkritik pendekatan yang terlalu berfokus pada indikator makroekonomi, serta menegaskan bahwa pembangunan yang sesungguhnya harus mencakup aspek sosial dan pemerataan, tidak hanya sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi.

2.1.3 Teori Trickle Down Effect

Teori ekonomi ini menjelaskan bahwa pertumbuhan yang terjadi pada kelompok ekonomi atas, seperti kalangan elit atau perusahaan besar, pada

akhirnya akan memberikan dampak kepada lapisan masyarakat bawah melalui mekanisme peningkatan produktivitas, investasi, dan distribusi pendapatan. Dalam konsep *trickle-down effect*, pertumbuhan ekonomi yang awalnya dinikmati oleh kelompok berpenghasilan tinggi diyakini akan menyebar secara bertahap kepada kelompok berpenghasilan rendah. Pada tahap awal, proses ini seringkali menimbulkan kesenjangan yang lebih lebar karena kelompok atas lebih cepat memperoleh manfaat dari investasi dan inovasi. Namun, dalam jangka panjang, pertumbuhan tersebut diharapkan dapat “mengalir ke bawah” melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, serta berkembangnya usaha kecil. manfaat pertumbuhan ekonomi akan menyebar secara bertahap kepada masyarakat melalui peningkatan kesempatan kerja, pendapatan, dan aktivitas ekonomi. Dengan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, tingkat kemiskinan cenderung menurun Istiqomah & Floresti, (2024). Meskipun demikian, teori ini banyak mendapat kritik karena dalam praktiknya pertumbuhan ekonomi tidak selalu secara otomatis mengurangi tingkat kemiskinan. Tanpa adanya kebijakan redistribusi yang efektif, seperti penerapan pajak progresif, pemberian subsidi pendidikan, atau program perlindungan sosial, kesenjangan justru berpotensi semakin meningkat.

2.1.4 Teori Kemiskinan (*Poverty Theory*)

Menurut World Bank (2007), kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi ketika individu kehilangan akses terhadap pilihan dan peluang dasar yang diperlukan untuk mencapai kehidupan yang layak, sehat, kreatif, serta memiliki standar hidup yang memadai, kebebasan, harga diri, dan penghargaan dari orang lain. Berdasarkan pengertian tersebut, kemiskinan dapat dimaknai sebagai keadaan di mana seseorang tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk

memenuhi kebutuhan dasarnya. Sementara itu, Nurske Prasetyoningrum, (2018) menyatakan bahwa *“a poor country is poor because it is poor”*, yang menggambarkan lingkaran kemiskinan. Kemiskinan terjadi akibat keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, serta keterbatasan modal yang berdampak pada rendahnya produktivitas suatu negara. Rendahnya produktivitas tersebut kemudian menyebabkan pendapatan menjadi rendah, sehingga kemampuan untuk menabung dan berinvestasi juga terbatas. Kondisi ini pada akhirnya memperkuat siklus keterbelakangan ekonomi.

World Bank (2004) mengukur kemiskinan berdasarkan tingkat pendapatan, di mana individu dengan pendapatan kurang dari 1 dolar AS per hari dikategorikan sebagai miskin. Selain itu, terdapat tiga indikator utama dalam mengukur kemiskinan, yaitu:

1. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Headcount Index*), yang menunjukkan jumlah penduduk dengan tingkat konsumsi di bawah garis kemiskinan, atau sering disebut sebagai insiden kemiskinan.
2. Indeks Kesenjangan Kemiskinan (*Poverty Gap Index*), yang menggambarkan selisih rata-rata antara tingkat konsumsi masyarakat dengan garis kemiskinan, di mana nilai nol diberikan kepada mereka yang berada di atas garis tersebut.
3. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*), yang mengukur tingkat ketimpangan di antara penduduk miskin dengan memperhitungkan kuadrat dari jarak konsumsi per kapita terhadap garis kemiskinan.

Dalam kaitannya penelitian ini teori kemiskinan yang dikemukakan oleh World Bank (2007) menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan kondisi ketika individu tidak memiliki akses yang memadai terhadap berbagai kebutuhan dasar dan

kesempatan untuk mencapai kehidupan yang layak. Kemiskinan dapat dipengaruhi oleh rendahnya pendapatan, keterbatasan akses terhadap layanan publik, serta rendahnya produktivitas masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah melalui kebijakan fiskal dan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan.

2.1.5 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi ketika individu tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak, baik dari aspek material, sosial, maupun moral. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan, yang diukur berdasarkan tingkat pengeluaran. Sementara itu, Bank Dunia (*World Bank*) menetapkan bahwa Garis kemiskinan ekstrem internasional yang baru, yang didefinisikan sebagai nilai tipikal garis kemiskinan nasional yang ditetapkan oleh negara-negara berpendapatan rendah, kini ditetapkan sebesar 3,00 Dolar AS per hari (setara dengan sekitar 546.400 Rupiah per bulan setelah memperhitungkan biaya hidup di Indonesia. Di sisi lain, Amartya Sen memandang kemiskinan tidak hanya sebatas kekurangan materi, tetapi juga sebagai keterbatasan dalam memperoleh kebebasan dasar. Hal tersebut mencakup akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

2.1.6 Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)

1. Cukai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995, cukai didefinisikan sebagai pungutan negara yang dikenakan pada barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik

husus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Setyowati et al., (2024), cukai merupakan bentuk pajak tidak langsung yang dibayarkan atas konsumsi barang tertentu yang termasuk dalam kategori barang kena cukai. Barang-barang tersebut memiliki karakteristik seperti: (a) konsumsinya perlu dikendalikan, (b) peredarannya memerlukan pengawasan, (c) penggunaannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan, serta (d) penggunaannya perlu dikenai pungutan negara guna menciptakan keadilan dan keseimbangan.

2. Tembakau

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tembakau adalah tanaman berdaun lebar yang diolah dengan cara dirajang dan dikeringkan untuk dijadikan bahan baku rokok, cerutu, dan produk sejenis lainnya. Tembakau merupakan komoditas perkebunan yang tidak dikonsumsi sebagai bahan pangan, melainkan digunakan sebagai bahan dasar industri rokok dan cerutu yang umumnya dikonsumsi sebagai sarana hiburan. Selain itu, kandungan metabolit sekunder dalam tembakau juga memungkinkan pemanfaatannya sebagai bahan pestisida dan bahan baku obat.

Di Indonesia, tembakau memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama dalam kontribusinya terhadap penerimaan negara melalui cukai dan devisa. Berdasarkan data P2PTM Kementerian Kesehatan RI (2018), Indonesia menempati posisi keenam sebagai negara penghasil tembakau terbesar di dunia setelah Cina, Brasil, India, Amerika Serikat, dan Malawi, dengan produksi sekitar 136 ribu ton atau sekitar 1,91% dari total produksi global Alvina & Hidayah, (2022). Tiga provinsi utama penghasil tembakau di Indonesia adalah Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Tengah. Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2007, hasil tembakau seperti sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, serta produk olahan lainnya termasuk dalam kategori barang kena cukai.

3. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)

Secara umum, sistem bagi hasil merupakan mekanisme pembagian hasil usaha antara dua pihak, yaitu pihak penyedia dana dan pihak pengelola dana. Dalam konteks ini, pemerintah pusat berperan sebagai penyedia dana, sedangkan pemerintah daerah sebagai pengelola. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan persentase tertentu.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020, dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) merupakan bagian dari transfer ke daerah yang diberikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau penghasil tembakau. Penyaluran dana ini dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah provinsi serta kabupaten/kota. Setelah menerima dana tersebut, gubernur memiliki kewajiban untuk mengelola dan mendistribusikannya kepada pemerintah kabupaten/kota berdasarkan kontribusi masing-masing daerah terhadap penerimaan cukai hasil tembakau.

4. Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, penggunaan DBHCHT dianggarkan berdasarkan pagu alokasi DBHCHT pada tahun anggaran berjalan yang ditambah dengan sisa DBHCHT, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sebesar 50% dialokasikan untuk bidang kesejahteraan masyarakat
- b. sebesar 10% dialokasikan untuk bidang penegakan hukum; dan
- c. sebesar 40% dialokasikan untuk bidang kesehatan.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) mengatur bahwa alokasi sebesar 50% untuk bidang kesejahteraan masyarakat dibagi ke dalam beberapa program, antara lain program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri hasil tembakau, peningkatan keterampilan kerja, dan pemberian bantuan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut. Sementara itu, Pasal 3 PMK Nomor 22 Tahun 2026 menjelaskan bahwa penggunaan DBHCHT dilaksanakan melalui program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, pemberantasan barang kena cukai ilegal, serta program kesehatan yang mendukung tujuan penggunaan DBHCHT.

2.1.7 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu cara untuk mengukur peningkatan nilai dan jumlah produksi barang serta jasa dalam periode tertentu, yang bertujuan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mendorong pembangunan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan suatu negara. Menurut Vogl (2015) dalam karyanya *"Poverty, Inequality, and Development"*, pertumbuhan ekonomi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, salah satunya adalah pertumbuhan pada sektor modern. Pertumbuhan pada sektor modern ditandai dengan berkembangnya aktivitas ekonomi di sektor industri yang umumnya menggunakan modal besar dalam proses produksinya. Sektor ini memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan output dan transformasi struktur ekonomi menuju arah yang lebih maju (Amar et al., 2020).

2.1.8 Hubungan DBHCHT Terhadap Kemiskinan

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk mendistribusikan kembali penerimaan negara kepada daerah, khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Secara konseptual, DBHCHT memiliki keterkaitan erat dengan penurunan tingkat kemiskinan karena dialokasikan untuk program-program yang bersifat sosial, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan DBHCHT diarahkan pada kegiatan seperti bantuan langsung tunai, peningkatan layanan kesehatan, pembinaan lingkungan sosial, serta pemberdayaan tenaga kerja di sektor tembakau, yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri, (2020), kebijakan pengelolaan DBHCHT memiliki peran yang signifikan dalam mendukung program pengentasan kemiskinan, karena mampu mengarahkan pemerintah daerah untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program sosial dan ekonomi.

2.1.9 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah yang biasanya diukur melalui kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam teori ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi sering dikaitkan sebagai salah satu faktor utama dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Secara teoritis, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan dijelaskan melalui konsep "*trickle-down effect*", yaitu ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka pendapatan masyarakat juga akan meningkat, sehingga dapat mengurangi jumlah

penduduk miskin. Peningkatan aktivitas ekonomi mendorong terciptanya lapangan kerja, meningkatkan upah, dan memperluas kesempatan usaha bagi masyarakat berpendapatan rendah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sagala et al., 2023) pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan karena manfaat pertumbuhan lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah ke atas sehingga meningkatkan ketimpangan

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini penelitian terdahulu dari penelitian sebelumnya untuk menjadikan referensi dalam penelitian ini.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel yang digunakan	Hasil Penelitian
1	Magdalena Nany, Daniel Budi Pratama, Prasetyaningrum, Astri Utami Kusumaningsih (2022). "Pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK dan Belanja Daerah terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah"	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, Data panel (tahun 2015–2019), 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, regresi linier berganda	Variabel Dependen (Y): 1. Tingkat kemiskinan Variabel Independen (X): 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2. Dana Bagi Hasil (DBH) 3. Dana Alokasi Umum (DAU) 4. Dana Alokasi Khusus (DAK) 5. Belanja Daerah	• PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan (semakin tinggi PAD kemiskinan menurun) • DBH berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan • DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan (kenaikan DAU justru meningkatkan kemiskinan) • Belanja Daerah berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sehingga peningkatan belanja daerah cenderung menurunkan kemiskinan, namun pengaruh tersebut belum cukup kuat secara statistik. • Semua variabel secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan.

No.	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel yang digunakan	Hasil Penelitian
2	Purnama, Herianto, Nurdin, Darmin Hasirun (2024). "Systematic Review: Analisis Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Buton"	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif	Variabel Dependen (Y): 1. Pertumbuhan ekonomi 2. Kemiskinan Variabel Independen (X): 1. Pendidikan 2. Pengangguran 3. Ketimpangan pendapatan	• Pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menurunkan kemiskinan, sehingga diperlukan kebijakan yang inklusif dan pemerataan agar manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat. • Faktor pendidikan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi merupakan faktor yang memengaruhi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Faktor-faktor tersebut menentukan apakah manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas. • Pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan sehingga diperlukan kebijakan pembangunan yang mampu menciptakan pemerataan pendapatan.

No.	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel yang digunakan	Hasil Penelitian
3	Hesty Aisyah, M. Dahniel Dahlan, Mira Aprila (2023). "Pengaruh Hubungan antara Ketimpangan Pendapatan, Pengurangan Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebuah Perspektif dari Indonesia"	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kuantitatif. Data panel dinamis, Estimasi GMM (Generalized Method of Moments), Tahun 2010–2022	Variabel Dependensi (Y): 1. Kemiskinan 2. Ketimpangan pendapatan Variabel Independen (X): 1. Pertumbuhan ekonomi (GDP) 2. Inflasi 3. Pengeluaran pemerintah 4. Pembangunan 5. Variabel lag (kemiskinan dan ketimpangan) Variabel kontrol: 1. Pendidikan 2. Pengangguran	• Ketimpangan pendapatan dan inflasi berhubungan positif sedangkan pengeluaran pemerintah dan pembangunan berada dalam kemiskinan negatif dan signifikan, hubungan dengan kemiskinan. • Ketimpangan pendapatan memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kemiskinan di Indonesia. Semakin tinggi ketimpangan pendapatan, semakin sulit upaya pengurangan kemiskinan. • Pertumbuhan ekonomi berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan, namun dampaknya akan lebih optimal apabila disertai dengan pemerataan distribusi pendapatan.

No.	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel yang digunakan	Hasil Penelitian
4	Suteki & Nastiti Rahajeng Putri (2020). "Kebijakan Pengaturan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Program Pembinaan Lingkungan Sosial Guna Pengentasan Kemiskinan"	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif , naturalistic paradigm,	Variabel utama (konsep yang dikaji): 1. Kebijakan pengelolaan DBHCHT 2. Program pembinaan lingkungan sosial 3. Pengentasan kemiskinan	• DBHCHT berperan penting sebagai instrumen kebijakan dalam pengentasan kemiskinan, meskipun implementasinya belum sepenuhnya optimal. • Keberhasilan pemanfaatan DBHCHT bergantung pada keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah (SKPD), masyarakat, dan sektor swasta dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.
5	Fastabiqul Khairat (2023). "Implementation of Direct Cash Assistance Funds	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini	Variabel utama: 1. Implementasi kebijakan BLT DBHCHT	• BLT DBHCHT hanya efektif sebagai bantuan jangka pendek, tetapi belum mampu menjadi solusi utama pengentasan kemiskinan sehingga

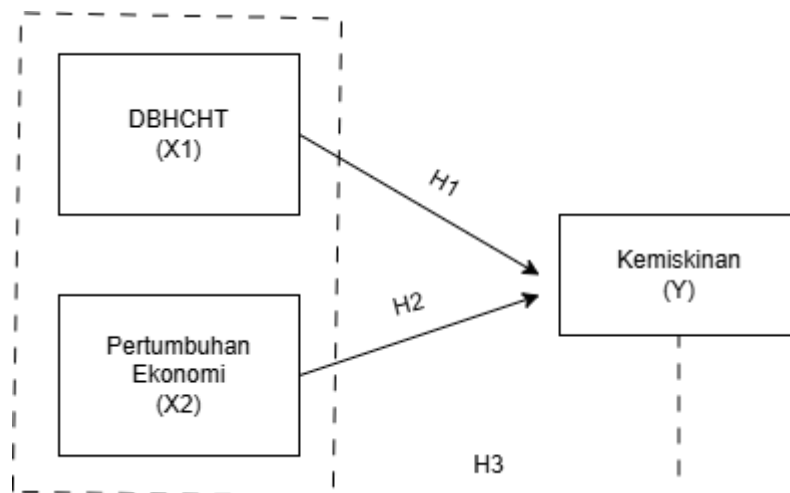
	for Excise Products on Tobacco Products (BLT DBHCHT)”	adalah metode Kualitatif,	2. Kesejahteraan pekerja pabrik rokok 3. Kebijakan sosial	perlu dikombinasikan dengan program pemberdayaan ekonomi. • Efektivitas program dipengaruhi oleh ketepatan sasaran penerima, koordinasi antarlembaga, serta
6	Suteki dan Nastiti Rahajeng Putri, (2020). ” Kebijakan Pengaturan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Program Pembinaan Lingkungan Sosial Guna Pengentasan Kemiskinan	Penelitian kualitatif dengan pendekatan naturalistik/studi kasus, purposive sampling, dan snowball sampling	Variabel Dependen (Y): 1. kemiskinan Variabel Independen (X): 1. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) / kebijakan pengelolaan DBHCHT	• Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan DBHCHT di setiap daerah berbeda-beda, namun secara kualitatif memiliki peran signifikan dalam mendukung program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan SKPD, penguatan ekonomi masyarakat, pelatihan kerja, serta pembinaan lingkungan sosial. • Optimalisasi penggunaan DBHCHT dapat menjadi instrumen kebijakan fiskal daerah yang mendukung penurunan tingkat kemiskinan apabila dikelola secara efektif, transparan, dan akuntabel.

No.	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel yang digunakan	Hasil Penelitian
7	Rosdina Sagala, Harlen, dan Bunga Chintia Utami (2023). " Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan TPT Terhadap Kemiskinan"	Penelitian kuantitatif menggunakan data time series tahun 2006–2021 dengan metode analisis regresi linier berganda	Variabel Dependensi (Y): 1. kemiskinan Variabel Independen (X): 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT	• Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. TPT juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Secara simultan, pertumbuhan ekonomi dan TPT bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Sumber : Data Diolah, (2026).

2.3. Kerangka Konseptual

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual



Keterangan :

—————> : Parsial

- - - - -> : Simultan

2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang masih harus diuji kebenarannya melalui data empiris. Dalam penelitian ilmiah, hipotesis penelitian disusun berdasarkan landasan teori desentralisasi fiskal, teori kemiskinan, teori pertumbuhan ekonomi, dan temuan penelitian terdahulu, serta berfungsi untuk menjelaskan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Hipotesis tidak bersifat mutlak benar, melainkan perlu dibuktikan melalui proses pengumpulan dan analisis data sehingga dapat diterima atau ditolak. Selain itu, hipotesis juga berperan sebagai pedoman dalam mengarahkan jalannya penelitian agar lebih sistematis dan terarah. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. H_1 : Dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2021–2025.

Berdasarkan teori kemiskinan (*poverty theory*), kemiskinan terjadi karena keterbatasan akses masyarakat terhadap pendapatan, kesempatan kerja, dan kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebagai salah satu bentuk transfer dana pemerintah daerah diharapkan mampu mendukung program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan layanan kesehatan, serta pembinaan lingkungan sosial sehingga dapat memengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Dugaan ini diperkuat dari temuan penelitian (Putri, 2020) yang berjudul " Kebijakan Pengaturan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Program Pembinaan Lingkungan Sosial Guna Pengentasan Kemiskinan" menunjukkan bahwa DBHCHT berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

2. H_2 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2021–2025.

Berdasarkan teori *Trickle Down Effect*, pertumbuhan ekonomi tidak selalu memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, karena hasil pertumbuhan cenderung lebih banyak dinikmati oleh kelompok tertentu terlebih dahulu. Akibatnya, dalam kondisi tertentu, pertumbuhan ekonomi justru belum mampu menurunkan kemiskinan secara langsung. Dugaan ini diperkuat dari temuan penelitian (Sagala et al., 2023) , yang berjudul "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Kemiskinan di Kabupaten Pelalawan" menunjukkan

bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

3. H_3 : Dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2021–2025.

Hal ini berarti keduanya secara bersama-sama memengaruhi tingkat kemiskinan. DBHCHT dapat menurunkan kemiskinan jika dimanfaatkan secara efektif untuk program kesejahteraan, sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, jika pertumbuhan tidak merata atau pengelolaan dana kurang optimal, maka dampaknya terhadap penurunan kemiskinan menjadi terbatas.